



PERUBAHAN RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN TABANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas karunianya, Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dapat kami selesaikan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat rencana kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan di tahun 2023 sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Teknokratik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan merupakan rencana kinerja Kepala Daerah terpilih Tahun 2021 - 2024 dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabanan 2021-2026. Perubahan Rencana Kerja menggambarkan target kinerja tahun 2023 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan yang sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju *good governance*.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 ini, sehingga segala usul saran yang bermanfaat untuk menyempurnakannya sangat kami harapkan dari segala kalangan. Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan membantu menyelesaikan penyusunan Perubahan

Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan ini.

Tabanan, 21 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN

TABANAN,



Dra. Ni Wayan Mariati,MM

Pembina TK.I (IV/b)

NIP.1968092619940320008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	1
I.3 Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TW II TAHUN BERKENAAN	
2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan TW II tahun Berkenaan	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .	32
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	32
BAB IV PENUTUP	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) bersih (*Clean Governance*). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh Perangkat Daerah mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Salah satu perencanaannya Perangkat Daerah yang wajib disusun setiap tahun adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun. Hal ini dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017, dimana dalam penyusunan Rencana Kerja harus memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator dan pendanaan serta rancangan awalnya telah dibuat bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun dasar hukum dari Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Rencana Kerja Awal Tahun 2023, adalah :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor



- 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



- 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425).
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
- 13 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tabanan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
- 14 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4);
 - 17 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabanan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 68);
 - 18 Peraturan Bupati Tabanan No. 46 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
 - 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11) ;
 - 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 16);
 - 21 Peraturan Bupati Tabanan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 41



Tahun 2022 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2023;

22 Surat Edaran Bupati Tabanan No. 050/2426/Bapelitbang tanggal 9 Agustus 2022 Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat, pemangku kepentingan ataupun stakeholder kepada pemerintah dalam rangka perwujudan *good and clean governance*, disamping itu sebagai kerangka arah pembangunan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2023. Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun ini antara lain adalah :

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.
2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2023 serta dana yang dibutuhkan.
3. Menyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan guna menciptakan perencanaan Kegiatan yang terpadu.
4. Menerima masukan maupun usulan – usulan program / kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari pemangku kepentingan ataupun stakeholder.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan



Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.5. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan Perubahan Renja PD, keterkaitan antara Perubahan Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.6. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.7. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja PD.

1.8. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI RENJA SAMPAI DENAGAN TW II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun TW II Tahun berjalan (Tahun 2023). Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan



pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi – evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan indikasi pendanaannya.

Bab IV Penutup



Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENAGAN TW II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai dengan TW II Tahun Berkenaan

Evaluasi pelaksanaan Renja dilihat melalui pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak lepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan mengukur kinerja kegiatan yang telah



dilakukan pada tahun yang akan dilaporkan. Pelaksanaan pengukuran dimulai dengan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui hasil kegiatan serta faktor yang mendukung dan penghambat pencapaian target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya *gap* maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus disajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Hasil Evaluasi Renja sampai dengan TW II tahun Berkenaan (2023) seperti tabel 2.1 berikut:



Kabupaten Tabanan

Tabel 2.1. Evaluasi Renja Sampai dengan TW II Tahun Berkenaan

OPD :DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Sasaran	Kode Rekening	Usuran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (output)	Target RPJMD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d RKPD Tahun 2022 (jumlah tahun 2021 + 2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja Pada Triwulan (APBD 2023; akumulasi sd TW berjalan)								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Triwulan I Tahun 2023	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s.d. Triwulan I Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s.d. Triwulan I Tahun 2023 (%)		Perangk at Daerah Penang gung Jawab	
											I		II		III		IV								
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							K
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13 / 5 x100%		15
			Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						DPPKB
			Bid. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																						DPPKB
1.	-	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	100 %	32.811.781. 525	100 %	11.951.215. 200	100%	4.156.036.9 00	13	541.058.135,00	30	1.264.067.0 14						1.805.125.1 49	100 %	13.756.340.3 49	100%	41,93%	DPPKB
		2.14.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output:Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sakip	2	25.000.000	2	10.000.000	2	5.000.000	11	555.000,00	-	0						555.000	2	10.555.000	100%	42,22%	DPPKB
		2.14.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	15.000.000	1	6.000.000	1	3.000.000	19	555.000,00	-	0						555.000	1	6.555.000	100%	43,70%	DPPKB



Kabupaten Tabanan

	2.14.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen SAKIP yg tersedia	1	10.000.000	1	4.000.000	1	2.000.000	-	0	-	0							1	4.000.000	100%	40,00%	DPPKB	
	2.14.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output:Persentase Terealisasinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	25.034.955.000	100 %	9.113.982.000	0 Orang/bulan	3.312.152.700	14	451.433.448,00	33	1.080.460.166							1.531.893.614	100 %	10.645.875.614	100%	42,52%	DPPKB
	2.14.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	25.009.955.000	100 %	9.103.982.000	100%	3.309.653.000	14	451.433.448,00	33	1.080.460.166							1.531.893.614	100 %	10.635.875.614	100%	42,53%	DPPKB
	2.14.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	2	25.000.000	2	10.000.000	0 Laporan	2.499.700	-	0	-	0							-	2	10.000.000	100%	40,00%	DPPKB
	2.14.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output: Persentase tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.554.560.000	100 %	411.824.000	100%	54.238.900	-	0	10	5.650.000							5.650.000	100 %	417.474.000	100%	26,85%	DPPKB
	2.14.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pemangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Th	100.000.000	-	-	100%	2.000.000	-	0	-	0							-	1 Th	-	1 Th	0,00%	DPPKB
	2.14.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Th	125.000.000	1 Th	30.000.000	1 Th	2.498.000	-	0	-	0							-	1 Th	30.000.000	1 Th	24,00%	DPPKB
	2.14.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Th	300.000.000	1 Th	100.000.000	1 Th	12.500.000	-	0	21	2.571.500							2.571.500	1 Th	102.571.500	1 Th	34,19%	DPPKB
	2.14.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Th	225.000.000	1 Th	80.000.000	1 Th	2.500.000	-	0	-	0							-	1 Th	80.000.000	1 Th	35,56%	DPPKB
	2.14.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Th	100.000.000	1 Th	20.000.000	1 Th	420.000	-	0	-	0							-	1 Th	20.000.000	1 Th	20,00%	DPPKB
	2.14.01.2.06.07	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya bahan/material kebutuhan kantor	1 Th	279.560.000	1 Th	81.824.000	1 Th	14.324.900	-	0	-	0							-	1 Th	81.824.000	1 Th	29,27%	DPPKB
	2.14.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Th	300.000.000	1 Th	100.000.000	1 Th	19.996.000	-	0	-	0							-	1 Th	100.000.000	1 Th	33,33%	DPPKB
	-	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertatanya arsip dinamis Perangkat Daerah	1 Th	125.000.000	-	-	1 Th	-	0	0	0	0							-	-	-	-	-	DPPKB
	2.14.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase Pengadaan BMD	100 %	286.284.500	100 %	520.157.200	100%	24.993.400	-	0	99	24.682.000							24.682.000	100 %	544.839.200	100%	190,31%	DPPKB
	2.14.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100 %	286.284.500	100 %	520.157.200	100%	24.993.400	-	0	99	24.682.000							24.682.000	100 %	544.839.200	100%	190,31%	DPPKB



Kabupaten Tabanan

		2.14.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3.408.397.000	100 %	1.370.374.000	100%	671.679.300	13	84.769.687,00	20	132.878.248					217.647.935	100 %	1.588.021.935	100%	46,59%	DPPKB
		2.14.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat pada perangkat daerah	1 Th	17.500.000	1 Th	7.600.000	1 Th	3.500.000	-	0	-	0					-	1 Th	7.600.000	1 Th	43,43%	DPPKB
		2.14.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	1 Th	207.478.000	1 Th	89.406.400	1 Th	41.495.500	7	2.816.557,00	15	6.276.927					9.093.484	1 Th	98.499.884	1 Th	47,47%	DPPKB
		2.14.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1Th	3.183.419.000	1Th	1.273.367.600	1Th	626.683.800	13	81.953.130,00	20	126.601.321					208.554.451	1Th	1.481.922.051	1 Th	46,55%	DPPKB
		2.14.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output: Persentase BMD yang Dipelihara	100 %	2.502.585.025	100 %	524.878.000	100%	87.972.600	5	4.300.000,00	23	20.382.000					24.682.000	100 %	549.560.000	100%	21,96%	DPPKB
		2.14.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Th	400.000.000	1 Th	80.000.000	1 Th	68.992.600	-	0	22	15.366.600					15.366.600	1 Th	95.366.600	1 Th	23,84%	DPPKB
		2.14.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 Th	352.585.025	1 Th	44.878.000	1 Th	18.980.000	23	4.300.000,00	27	5.030.000					9.330.000	1 Th	54.208.000	1 Th	15,37%	DPPKB
		-	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Persentase supras gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terrehabilitasi	100 %	1.750.000.000	100 %	400.000.000	100%	0	0	0	0	0					-	100 %	400.000.000	100%	22,86%	DPPKB
2.		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase pasangan usia subur peserta KB aktif						359.200.000	4	13.400.300,00	13	47.704.500					61.104.800	0	61.104.800	0	0	DPPKB
		2.14.02.2.01	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Output: Persentase Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						100.000.000	-	0	-	0					-	0	-	0	0	DPPKB
		2.14.02.2.01.02	Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota						100.000.000	-	0	-	0					-	0	-	0	0	DPPKB



Kabupaten Tabanan

		2.14.02.2.02	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Kabupaten/Kota						259.200.000	5	13.400.300,00	18	47.704.500					61.104.800	61.104.800	0	0	DPPKB	
		2.14.02.2.02.09	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraab Sistem Informasi Keluarga	Output: Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Sistem Informasi Keluarga					64.200.000	11	7.000.000,00	13	8.203.900					15.203.900	15.203.900	0	0	DPPKB	
		2.14.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Output: Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga					135.000.000	-	0	20	26.700.000					26.700.000	26.700.000	0	0	DPPKB	
		2.14.02.2.02.13	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Output: Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB					60.000.000	11	6.400.300,00	21	12.800.600					19.200.900	19.200.900	0	0	DPPKB	
3.		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA	85%	20.231.129.640	77%	7.299.662.000	79%	2.716.272.000	3	72.915.028,00	24	656.377.080				729.292.108	85%	8.028.954.108	100%	39,69%	DPPKB
		2.14.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Output:Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	85%	8.418.155.000	77%	3.169.670.000	79%	921.500.000	6	56.761.028,00	38	346.496.040				403.257.068	85%	3.572.927.068	100%	42,44%	DPPKB
		2.14.03.2.01.01	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPk Kepada Stakholder dan Mitra Kerja	Persentase PPKBD dan IMP yang mendapat advokasi program KKBPk	85%	150.000.000	77%	17.000.000	79%	80.000.000	-	0	20	15.825.000				15.825.000	85%	32.825.000	100%	21,88%	DPPKB
		-	Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPk	Persentase penyediaan sarana KIE program KKBPk	85%	180.655.000	77%	162.666.000	79%	-	-	0	-	0				-	85%	162.666.000	100%	90,04%	DPPKB
		2.14.03.2.01.04	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang					150.000.000	-	0	37	55.000.000					55.000.000	55.000.000	0	0	DPPKB	



Kabupaten Tabanan

		2.14.03.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						130.000.000	8	10.664.000,00	24	31.506.000					42.170.000	42.170.000	0	0	DPPKB	
		2.14.03.2.01.07	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah jenis supras yang diadakan	10 Pkt	8.087.500,00	10 Pkt	2.990.004,00	10 Pkt	481.500.000	10	46.097.028,00	45	217.327.040					263.424.068	10 Pkt	3.253.428,068	0	40,23%	DPPKB
		2.14.03.2.01.08	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK						80.000.000	-	0	34	26.838.000					26.838.000		26.838.000	0	0	DPPKB
		2.14.03.2.02	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Output: Persentase PKB/PLKB yang mendapat penguatan KKBPK	85%	3.192.000,00	77%	1.276.800,00	79%	322.000.000	-	0	26	83.400.000					83.400.000	85%	1.360.200,00	100%	42,61%	DPPKB
		2.14.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bagga Kencana (Pembangunan Keluarga, Keperendukan dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB						56.000.000	-	0	25	14.200.000					14.200.000		14.200.000	0	0	DPPKB
		2.14.03.2.02.04	Sub Kegiatan Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang digerakan	85%	192.000.000	77%	76.800.000	79%	266.000.000	-	0	26	69.200.000					69.200.000	85%	146.000.000	100%	76,04%	DPPKB
		-	Sub Kegiatan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan	58 Orang	3.000.000,00	58 Orang	1.200.000,00	58 Orang	-	-	0	-	0					-	58 Orang	1.200.000,00	0	40,00%	DPPKB
		2.14.03.2.03	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Output: Jumlah PUS Miskin yang Terlayani KB	1034 PUS	5.792.574,64	4138 PUS	1.787.832,00	3873 PUS	1.308.772,00	0	5.200.000,00	14	181.865.540					187.065.540	1034 PUS	1.974.897,54	0	34,09%	DPPKB
		2.14.03.2.03.01	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Pemunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase distribusi alokan	85%	1.000.000,00	77%	200.000.000	79%	46.800.000	-	0	28	13.316.500					13.316.500	85%	213.316.500	100%	21,33%	DPPKB



Kabupaten Tabanan

	2.14.03.2.03.03	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase peningkatan jumlah penggunaan MKJP	85%	4.092.574.640	77%	1.527.832.000	79%	1.235.872.000	0	5.200.000,00	13	164.799.040					169.999.040	85%	1.697.831.040	100%	41,49%	DPPKB
	-	Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Persentase penurunan jumlah Unmetneed	85%	350.000.000	77%	30.000.000	79%	-	-	0	-	-					-	85%	30.000.000	100%	8,57%	DPPKB
	-	Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	85%	350.000.000	77%	30.000.000	79%	-	-	0	-	0					-	85%	30.000.000	100%	8,57%	DPPKB
	2.14.03.2.03.08	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaring dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						26.100.000	-	0	14	3.750.000					3.750.000		3.750.000	#DIV/0!	0	DPPKB
	2.14.03.2.04	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertian ber-KB	Output: Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB	85%	2.828.400.000	77%	1.065.360.000	79%	164.000.000	7	10.954.000	27	44.642.500					55.596.500	85%	1.120.956.500	100%	39,63%	DPPKB
	2.14.03.2.04.02	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB						9.000.000	-	0	-	0					-		-	0	0	DPPKB
	2.14.03.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Persentase meningkatnya pelaksanaan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	85%	2.828.400.000	77%	1.065.360.000	79%	155.000.000	7	10.954.000	29	44.615.500					55.569.500	85%	1.120.929.500	100%	39,63%	DPPKB
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE KELUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	80%	1.065.081.005	76%	380.000.000	77%	2.602.800.000	-	0	22	567.000.000					567.000.000	80%	947.000.000	100%	88,91%	DPPKB
	2.14.04.2.01		Output: Persentase Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	80%	400.000.000	76%	163.935.800	77%	2.602.800.000	-	0	22	567.000.000					567.000.000	80%	730.935.800	100%	182,73%	DPPKB
	2.14.04.2.01.02	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (KKB, BKR, EKL, PK-R, PPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Cakupan PUS menikah dia atas 21 tahun	80%	200.000.000	76%	80.000.000	77%	-	-	0	-	0					-	80%	80.000.000	100%	40,00%	DPPKB



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali, dimana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati Tabanan karena Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berada di bawah naungan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan, oleh sebab itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja berdasarkan Visi dan Misi dari Kabupaten Tabanan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas dan fungsi berpodoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Dalam membantu pemerintah Kabupaten Tabanan setiap OPD tentu harus membuat tolak ukur sejauh mana hasil kinerja yang telah dilakukan di OPD masing-masing, setiap OPD khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai indikator sebagai landasan untuk bekerja dalam mewujudkan visi dan misi dari pemerintah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai dua indikator yaitu Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga.

Penentuan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggunakan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang dimiliki. Sesuai dengan IKU yang ditetapkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat 2 (dua) indikator utama sesuai dengan tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

NO	IKU	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-		REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	Catatan Analisis
		2021	2022	2021	2022	2023	
	1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Keluarga Binaan yang telah Melaksanakan 8 Fungsi Keluarga	41,99%	45%	41,99%	45%	48%	-



2.3 Isue-isue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Persoalan pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan bagian penting dalam proses pembangunan, karena penduduk merupakan titik sentral dari pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan bangsa sangat tergantung dari keluarga yang berkualitas dengan pertumbuhan yang seimbang dan ini merupakan hasil dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan merupakan organisasi perangkat daerah yang baru berdiri pada tahun 2017 sehingga dalam penyusunan perencanaan dan program prioritas belum dapat dilaksanakan secara optimal karena minimnya ketersediaan data pendukung awal. Dampak dari belum optimalnya penyusunan perencanaan tersebut adalah belum maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ditengah banyaknya tantangan selain seperti yang telah disebutkan di atas dan keterbatasan pendanaan, pencapaian terhadap misi dinas, visi dan program kabupaten masih dapat tercapai melalui pemanfaatan peluang-peluang seperti sumber daya manusia yang melimpah di Kabupaten Tabanan dan pemanfaatan pendanaan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat melalui sinkronisasi dan sinergisitas kegiatan.

Dari gambaran permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang serta mengacu kepada situasi yang berkembang dan menelaah kebijakan pembangunan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana pemerintah pusat, maka terdapat beberapa rangkuman isu penting yang perlu mendapat tindaklanjut guna perumusan program dan kegiatan prioritas dalam penyusunan rencana kerja. Adapun isue-isue tersebut adalah:

- a. meningkatnya angka kelahiran total (TFR);
- b. menurunnya persentase pasangan usia subur yang memakai alat kontrasepsi (current user);



- c. berubahnya pola pemilihan metode kontrasepsi dari metode jangka panjang yang tingkat kelangsungan pemakaiannya (continuation rate) lebih tinggi ke metode jangka pendek yang tingkat kelangsungannya lebih pendek;
- d. meningkatnya jumlah Unmet Need;
- e. usia Perkawinan pertama bagi WUS masih di bawah usia 21 Tahun;
- f. ASFR usia melahirkan bagi wanita 15 – 19 tahun;
- g. masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR);
- h. masih rendahnya pengetahuan Pasangan Usia Subur (PUS) tentang keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- i. masih rendahnya partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja;
- j. belum optimalnya pemanfaatan kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan, dan kemadirian peserta KB;
- l. masih adanya masalah kematian ibu hamil dan melahirkan (AKI).

Isue-isue tersebut dituangkan dalam suatu program dan kegiatan yang inovatif, aplikatif serta sesuai dengan tupoksi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sehingga mampu mencapai misi “Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Nyaman dan Aman Dalam Perikehidupan (Aman)” dan visi “Nangun Sat Kethi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul dan Madani”. Agar hal tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan program dan perencanaan perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang mendukung pada terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dengan Pertumbuhan yang Seimbang.



- Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam Program Operasional Bangga Kencana.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan yang baik dan benar, sebuah tujuan bisa didapat dengan lebih baik pula.

Terdapat beberapa metode dalam penyusunan perencanaan. Namun usulan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2023 berasal dari kebutuhan perangkat daerah yang mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2021 – 2026. Rancangan Perubahan kegiatan tahun 2023 terdiri dari 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Rincian usulan tersebut dapat dilihat secara detail pada Tabel 2.3. di bawah ini.



Tabel 2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.14.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	6.005.485.638	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	6.115.000.000	
2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sakip	2 Dok	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dok	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sakip	2 Dok	7.000.000	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	1 DoK	3.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	1 Dok	4.000.000	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen Sakip yang tersedia	1 Dok	2.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen Sakip yang tersedia	1 Dok	3.000.000	
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terealisasinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.556.991.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terealisasinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.607.500.000	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	4.551.991.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	4.600.000.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen asset	2 Dok	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen asset	2 Dok	7.500.000	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	220.912.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	245.500.000	



Kabupaten Tabanan

01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	Kab. Tabanan	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Th	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	Kab. Tabanan	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Th	7.500.000	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Th	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Th	17.500.000	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Th	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Th	55.000.000	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Th	40.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Th	45.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Th	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Th	12.500.000	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan material kebutuhan kantor	1 Th	40.912.000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan material kebutuhan kantor	1 Th	43.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Th	50.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Th	55.000.000	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Tercatatnya arsip dinamis perangkat daerah	1 Th	10.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Tercatatnya arsip dinamis perangkat daerah	1 Th	10.000.000	
2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan BMD	100%	270.078.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan BMD	100%	280.000.000	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	270.078.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	280.000.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	681.679.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	695.000.000	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa surat menyurat pada perangkat daerah	1 Th	3.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa surat menyurat pada perangkat daerah	1 Th	3.500.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Th	41.495.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Th	41.500.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 Th	636.683.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 Th	650.000.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang Dipelihara	100%	270.825.238	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang Dipelihara	100%	280.000.000	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan	1 Th	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan	1 Th	45.000.000	



Kabupaten Tabanan

	Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dinas operasional atau lapangan			Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		dinas operasional atau lapangan		
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 Th	22.825.238	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 Th	25.000.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	100%	208.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	100%	210.000.000
2.14.03	PEMBINAAN KEUARGA BERENCANA (KB)		CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA	79%	3.702.869.910	PEMBINAAN KEUARGA BERENCANA (KB)		CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA	79%	3.813.000.000
2.01	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	79%	1.638.631.000	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	79%	1.650.000.000
01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholder dan Mitra Kerja	10 Kec	Persentase PPKBD dan IMP yang mendapat advokasi program KKBPK	79%	10.000.000	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholder dan Mitra Kerja	10 Kec	Persentase PPKBD dan IMP yang mendapat advokasi program KKBPK	79%	15.000.000
03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10 Kec	Persentase penyediaan sarana KIE program KKBPK	79%	11.131.000	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10 Kec	Persentase penyediaan sarana KIE program KKBPK	79%	15.000.000
07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	10 Kec	Jumlah jenis saptas yang diadakan	10 Pkt	1.617.500.000	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	10 Kec	Jumlah jenis saptas yang diadakan	10 Pkt	1.620.000.000
2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase PKB/PLKB yang mendapat Penguatan KKBPK	79%	638.400.000	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		Persentase PKB/PLKB yang mendapat Penguatan KKBPK	79%	700.000.000
01	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10 Kec	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang digerakan	79%	38.400.000	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10 Kec	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang digerakan	79%	50.000.000



Kabupaten Tabanan

03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Kec	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan	58 Orang	600.000.000	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Kec	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan	58 Orang	650.000.000	
2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PUS Misikin yang Terlayani KB	3873 PUS	883.494.510	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PUS Misikin yang Terlayani KB	3873 PUS	920.000.000	
01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Kec	Persentase distribusi alokon	79%	100.000.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	10 Kec	Persentase distribusi alokon	79%	115.000.000	
03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Kec	Persentase peningkatan jumlah penggunaan MKJP	79%	753.494.510	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Kec	Persentase peningkatan jumlah penggunaan MKJP	79%	765.000.000	
07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	10 Kec	Persentase penurunan jumlah Unmetneed	79%	15.000.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	10 Kec	Persentase penurunan jumlah Unmetneed	79%	20.000.000	
11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10 Kec	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	79%	15.000.000	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10 Kec	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	79%	20.000.000	
2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB	79%	542.344.400	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi masyarakat dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB	79%	543.000.000	



Kabupaten Tabanan

	Pembinaan Kesertaan ber-KB					Pembinaan Kesertaan ber-KB					
03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	10 Kec	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	79%	542.344.510	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	10 Kec	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	79%	543.000.000	
2.14	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		PERSENTASE KEUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	77%	194.940.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		PERSENTASE KEUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	77%	200.000.000	
2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	77%	80.000.000	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	77%	85.000.000	
04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Persentase Tim Teknis/Kader yang mendapat pelatihan	77%	40.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Persentase Tim Teknis/Kader yang mendapat pelatihan	77%	42.500.000	
07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Cakupan PUS menikah dia atas 21 tahun	77%	40.000.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Cakupan PUS menikah dia atas 21 tahun	77%	42.500.000	
2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Peningkatan peserta KB Aktif	77%	114.940.000	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Organisasi Masyarakat yang Terlibat dalam Peningkatan peserta KB Aktif	77%	115.000.000	



Kabupaten Tabanan

	dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Persentase kader KKBPk yang mendapat bintek	77%	114.940.000	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Persentase kader KKBPk yang mendapat bintek	77%	115.000.000	

**Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, menyatakan bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja dapat dilaksanakan langsung oleh perangkat daerah atau ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap berpedoman kepada Rencana Strategis SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut dan mengacu kepada Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta untuk memastikan usulan-usulan sesuai dengan issue dan tupoksi, maka dalam penyusun Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dilakukan dengan cara:

1. Melibatkan Tim penyusun perencanaan dinas, Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
2. Mendorong partisipasi Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kader Keluarga Berencana, Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya.
3. Berpartisipasi dalam Musrenbang Kabupaten baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten.

Melalui proses tersebut maka terinventaris usulan-usulan awal dari para pemangku kepentingan sebagaimana disajikan pada Tabel 2.5 di bawah ini.

Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
2.1 4.0 1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	
2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sakip	2 Dokumen	



Kabupaten Tabanan

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	1 Dokumen	
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen Sakip yang tersedia	1 Dokumen	
2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Terealisasinya Keuangan Perangkat Daerah	100%	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Persentase terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen asset	2 Dokumen	
2.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terealisasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Banguna Kantor	Kab. Tabanan	Komponen instalasi listrik yang tersedia	1 Th	
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Tersedianya peralatan rumah tangga	1 Th	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan logistik kantor	1 Th	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Th	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Th	
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Tersedianya bahan material kebutuhan kantor	1 Th	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	1 Th	
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Tabanan	Tercatatnya arsip dinamis perangkat daerah	1 Th	
2.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan BMD	100%	
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase pengadaan peralatan dan mesin	100%	
2.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa surat menyurat pada perangkat daerah	1 Th	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 Th	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	1 Th	
2.0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang Dipelihara	100%	



Kabupaten Tabanan

02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Tabanan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan	1 Th	
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	1 Th	
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabanan	Persentase sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang terpelihara/terehabilitasi	100%	
2.1	PEMBINAAN		CAKUPAN	79%	
4.0	KEUARGA		PENYEDIAAN		
3	BERENCANA (KB)		INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA		
2.0	Pelaksanaan Advokasi		Persentase Kader KB	79%	
1	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)		
01	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakholder dan Mitra Kerja	10 Kec	Persentase PPKBD dan IMP yang mendapat advokasi program KKBPK	79%	
03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	10 Kec	Persentase penyediaan sarana KIE program KKBPK	79%	
07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	10 Kec	Jumlah jenis sapsras yang diadakan	10 Pkt	
2.0	Pendayagunaan		Persentase PKB/PLKB	79%	
2	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		yang mendapat Penguatan KKBPK		
01	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10 Kec	Persentase Kader Institusi Masyarakat Pedesaan yang digerakan	79%	
03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	10 Kec	Jumlah PKB/PLKB yang mendapat penguatan	58 Orang	
2.0	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah PUS Misikin yang Terlayani KB	3873 PUS	
3					
01	Pengendalian Pendistribusian Alat	10 Kec	Persentase distribusi alokon	79%	



Kabupaten Tabanan

	dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				
03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10 Kec	Persentase peningkatan jumlah penggunaan MKJP	79%	
07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	10 Kec	Persentase penurunan jumlah Unmetneed	79%	
11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	10 Kec	Persentase PUS miskin yang terlayani KB	79%	
2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB		Persentase Peningkatan Peran serta Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan ber-KB	79%	
03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	10 Kec	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	79%	
2.1 4.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		PERSENTASE KEUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	77%	
2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	77%	
04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Persentase Tim Teknis/Kader yang mendapat pelatihan	77%	
07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Kec	Cakupan PUS menikah dia atas 21 tahun	77%	



Kabupaten Tabanan

<p>2.0 2</p>	<p>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>		<p>Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat dalam Peningkatan peserta KB Aktif</p>	<p>77%</p>	
<p>01</p>	<p>Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK-R, PPPKS dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</p>	<p>10 Kec</p>	<p>Persentase kader KKBPK yang mendapat bintek</p>	<p>77%</p>	

**BAB III****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan**

Upaya mewujudkan Keluarga Berkualitas dengan Pertumbuhan yang Seimbang di Kabupaten Tabanan perlu diupayakan secara simultan dan terintegrasi melalui kelompok-kelompok kegiatan seperti BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS serta meningkatkan peran serta Institusi Masyarakat Pedesaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja lainnya. Upaya-upaya tersebut perlu difasilitasi baik berupa kebijakan maupun pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk maksud tersebut perlu disusun rencana kegiatan sebagaimana terurai pada Tabel 3.1. seperti berikut di bawah ini.

Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan T.A.2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023	
				TARGET KINERJA	Rp
1	2	3	4	5	6
2.1 4.0 1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	4.400.495.700
2.0 1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Sakip	2 Dokumen	5.000.000
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersedia	1 Dokumen	3.000.000



Kabupaten Tabanan

07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen Sakip yang tersedia	1 Dokumen	2.000.000
2.0	Administrasi		Persentase Terealisasinya	100%	3.543.767.500
2	Keuangan Perangkat Daerah		Keuangan Perangkat Daerah		
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Tabanan	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	3.541.267.800
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah dokumen asset	2 Dokumen	2.499.700
2.0	Administrasi Umum		Persentase tersedianya	100%	75.438.900
6	Perangkat Daerah		Administrasi Perangkat Daerah		
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banguna Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Banguna Kantor yang disediakan	1 Paket	2.000.000
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tabanan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	2.498.000
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	18.006.000
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Tabanan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan Yang Disediakan	1 Paket	2.500.000
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	9 Dokumen	420.000
07	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Tabanan	Jumlah Paket bahan material yang disediakan	1 Paket	14.324.900
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	2 laporan	35.690.000
2.0	Pengadaan Barang		Persentase	100%	24.993.400
7	Milik Daerah		Pengadaan BMD		
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya disediakan	1 Unit	24.993.400



Kabupaten Tabanan

2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	556.823.300
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Tabanan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	750.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0 Laporan	29.489.500
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	526.583.800
2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase BMD yang Dipelihara	100%	194.472.600
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Tabanan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya.	4 Unit	75.492.600
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Unit	18.980.000
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Tabanan	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainya yang dipelihara/direhabilitasi.	1 Unit	100.000.000
2.1 4.0 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		Persentase pasangan usia subur peserta KB Aktif	100%	259.200.000
2.0 1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				0
01	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Kab. Tabanan			0



Kabupaten Tabanan

	(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				
2.0 2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			3 Lap dan 2 Dokumen	259.200.000
09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	64.200.000
12	Pencatatan dan Pelaporan Data Keluarga	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	2 Laporan	135.000.000
13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	5 Dok	60.000.000
2.1 4.0 3	PEMBINAAN KEUARGA BERENCANA (KB)		CAKUPAN PENYEDIAAN INFORMASI DATA MIKRO KELUARGA DI SETIAP DESA	79%	2.921.272.000
2.0 1	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal		Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	77%	1.080.200.000
01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan mitra Kerja	Kab. Tabanan	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	2 Organisasi	170.000.000
04	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media cetak dan elektronik serta media luar ruang	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Dokumen	182.300.000



Kabupaten Tabanan

			Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		
06	Pelaksanaan mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), dan Mimitlokakarya (Minilok)	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	130.000.000
07	Pengelolaan Oprasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	517.900.000
08	Pengendalian Program KKBPK	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	80.000.000
2.0	Pendayagunaan		Persentase	77%	
2	Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		PKB/PLKB yang mendapat Penguatan KKBPK		339.700.000
01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kab. Tabanan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Lini	2 Organisasi	73.700.000



Kabupaten Tabanan

			Lapangan oleh PKB/PLKB		
04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kab. Tabanan	Jumlah Kader yang Mengikuti Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.330 Orang	266.000.000
2.0 3	Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	40 Paskes	1.322.372.000
01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	46.800.000
03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kab. Tabanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.718 Orang	1.249.472.000
08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kab. Tabanan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	1 Laporan	26.100.000



Kabupaten Tabanan

			Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		
2.0 4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB				179.000.000
02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kab. Tabanan	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	9.000.000
03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPB di Kampung KB	Kab. Tabanan	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12 Kampung	170.000.000
2.1 4.0 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		Persentase Keluarga yang Memiliki Pemahaman dan Kesadaran tentang Fungsi Keluarga	78%	2.622.800.000
2.0 1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Persentase meningkatnya Pengetahuan Remaja yang	79%	2.622.800.000



Kabupaten Tabanan

			mendapat bimtek Persentase Peningkatan Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Kab. Tabanan	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Unit	360.000.000
05	Penyediaan Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Kab. Tabanan	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga?UPPKS)	1.068 Orang	2.262.800.000
	JUMLAH TOTAL				10.203.767.700



BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang sangat menentukan arah kebijakan pembangunan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Visi dan Misi pimpinan daerah terpilih, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dimana proses penyusunannya melibatkan partisipasi para stakeholder dibidang kependudukan dan keluarga berencana.

Tentunya untuk dapat mencapai sasaran pengembangan ekonomi kerakyatan yang berbasis pertanian kita tidak bisa mengabaikan pembangunan bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana. Pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana akan mewujudkan keluarga berkualitas dengan pertumbuhan yang seimbang sehingga mampu menjadi titik sentra pembangunan. Dengan mengacu kepada issue strategis bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana maka didalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan secara simultan mendorong partisipasi para pemangku kepentingan.

Mengacu kepada proses tersebut maka Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2023 memuat 4 (empat) program, 13 (tiga belas) kegiatan



Kabupaten Tabanan

dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan nilai mencapai Rp.10.203.767.700,- Besaran anggaran Rencana Kerja tersebut tentunya masih jauh dari ideal bila dibandingkan dengan tantangan dalam mewujudkan Keluarga Berkualitas dengan pertumbuhan yang seimbang. Untuk itu perlu beberapa tindak lanjut yang mesti dilakukan, seperti melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk memperoleh dukungan pendanaan yang lebih besar, meningkatkan peran aktif dari para pemangku kepentingan dan juga merangsang swadaya masyarakat.

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TABANAN,



Dra. Wayan Mariati, M.M.

Kambina Tk.I (IV/b)

NIP.19680926 199403 2 008